

# PENGARUH PENGUNGKAPAN PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL TERHADAP KEPEMILIKAN ASING

Rosiana Oktavia  
Universitas Negeri Surabaya  
[rosianaoktaviaaa@gmail.com](mailto:rosianaoktaviaaa@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of intellectual capital disclosure on the cost of equity in manufacturing companies in Indonesia by adding control variables in the form of firm size, leverage, and market to book value. The research sample was 141 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016. The samples were processed using a simple linear regression method. Based on the results of the empirical test, the conclusion is that intellectual capital disclosure, as measured by the ICD index has a positive influence on the cost of equity of manufacturing companies in Indonesia. This shows that Thus if a company increasingly expresses its intellectual capital in the financial statements, it will attract investors because investors are more free to make decisions regarding the investment funding. If the company gets a lot of injections of funds for the sale of its shares, the company will also be more free to expand business and high promotional costs as well as hoping to get high profits as well so that the return on capital costs will also be higher.*

**Keywords:** *intellectual capital disclosure, cost of equity, firm size, leverage, market to book value.*

## **PENDAHULUAN**

Kemajuan industri saat ini dapat memberikan beberapa peluang untuk memperoleh penghasilan yang optimal. Kemajuan industri yang berkembang pesat di Indonesia menarik investor asing dan dalam negeri untuk menanamkan dananya didalam perusahaan. Menurut Karima (2014) kepemilikan modal asing pada perusahaan yang semakin tinggi tentunya membuat pihak manajemen melakukan pengawasan yang lebih ketat dan melaporkan berbagai kegiatan sosial perusahaan.

Pengertian modal asing merupakan modal yang dimiliki oleh pemodal asing yang berasal dari negara lain atau badan usaha lainbaik perseroan maupun individual. Apabila mengacu pada pasal satu nomor tiga UU tentang penanaman modal perusahaan no. dua puluh lima tahun dua ribu tujuh, penanaman modal asing yaitu kegiatan memberikan modal berupa saham untuk kegiatan usaha yang dilakukan di Indonesia oleh pihak asing baik secara keseluruhan maupun secara patungan.

Pengungkapan pertanggungjawaban sosial menjadi perhatian investor untuk menanamkan dananya di dalam perusahaan pengungkapan pertanggungjawaban sosial merupakan hal baru di dalam dunia perekonomian. Pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan berbeda antara satu dengan lainnya. Setiap perusahaan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda untuk mencerminkan perbedaan dalam posisi kompetitif, industri, negara, tekanan lingkungan dan ekonomi serta sejumlah faktor lainnya. Aktivitas perusahaan memiliki dampak yang luas bagi perekonomian, lingkungan, dan sosial. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan harus mempunyai tanggung jawab atas ketiga dampak tersebut. Pertanggungjawaban sosial salah satu hal baru yang timbul dalam perkembangan ekonomi di

Indonesia. Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* menurut Fitria dan Hartanti (2010) adalah wacana yang makin umum dalam dunia bisnis di Indonesia. Tanggung jawab sosial menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk mendapatkan perhatian publik untuk memakai produk mereka.

Salah satu contoh perusahaan di Amerika yang menerapkan pertanggungjawaban sosial yaitu perusahaan Exxon Mobil yang melakukan kinerja lingkungan seperti emisi udara, pengeboran berwawasan lingkungan, pengelolaan lingkungan, Remediasi situs operasi. Selain itu perusahaan-perusahaan Eropa juga menerapkan pertanggungjawaban sosial dengan melakuka isu sosial misalnya seperti pelanggaran hak asasi manusia, tenaga kerja, pendidikan serta isu tentang faktor lingkungan seperti efek rumah kaca, pembalakan liar, serta pencemaran air. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan yang mengungkapkan CSR dengan lebih baik akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Sembiring dalam penelitiannya pada tahun 2003 dan 2005 mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan besar yang dalam kegiatan usahanya juga menerapkan kemakmuran bagi masyarakat sekitarnya biasanya cenderung lebih meamiliki banyak pemodal asing daripada yang tidak melakuakan pertanggungjawaban sosial di lingkungan sekitarnya.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### ***Agency Theory***

Jensen & Meckling dalam penelitiannya pada tahun (1976) berpendapat bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah keterkaitan antara *principals* dengan *agents*. *Principals* merupakan pemilik perusahaan atau investor yang menanamkan modalnya di perusahaan sedangkan *agents* merupakan manajemen yang melaksanakan perintah dari *principals* dan menjalankan kegiatan operasional perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hubungan antara *principals* dan *agents* sangat rentan terjadinya suatu konflik. Dengan demikian hal tersebut perlu menjaga hubungan baik antara *principals* dengan *agents* dan tanpa memihak salah satu pihak. Perjanjian kontrak kerja yang baik antara prinsipal dan agen harus berisi penjelasan mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh manajemen dalam mengelola dana yang ditanamkan oleh investor & pembagian pengembalian antara investor & pihak manajemen.

Kinerja yang efisien dipengaruhi oleh usaha dan kondisi lingkungan. Menurut Lubis (2010), perbedaan kepentingan antara agen dan principal memiliki tugas yang berbeda satu sama lain. Dimana investor menginginkan saham yang lebih besar atas investasi yang ditanamkan investor dengan secepat-cepatnya sedangkan manajemen menginginkan apresiasi dari pemegang saham dengan pemberian imbalan yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan bisnis perusahaan.

### ***Stakeholder Theory***

*Stakeholders* merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan maupun suatu kelompok terhadap organisasi lain yang berdampak kepada segala aktivitasnya (Freeman dan McVea,

2011). Teori *stakeholder* menyatakan bahwa pihak manajemen selaku agen harus melakukan segala aktivitas operasional perusahaan sesuai dengan kehendak dari pihak *stakeholder* dan juga melaporkannya kepada pihak *stakeholder* tersebut (Guthrie, et al., 2004). Teori *stakeholder* mengharuskan untuk mengetahui segala hal dalam laporan tahunan. Baik informasi *voluntary* (pengungkapan sukarela) maupun *mandatory* (pengungkapan wajib) mengenai bagaimana kegiatan perusahaan berdampak pada *stakeholder*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* perusahaan tersebut.

### ***Legitimation Theory***

Teori ini menjelaskan bahwa suatu perusahaan yang beroperasi dengan norma dalam masyarakat atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana mereka berusaha untuk memastikan aktivitas mereka (perusahaan) diterima oleh pihak luar sebagai suatu yang “sah. Badjuri (2011) menyarankan bahwa organisasi mengungkapkan kinerja lingkungan mereka dalam berbagai komponen untuk mendapatkan reaksi positif dari lingkungan dan mendapatkan legitimasi atas usaha perusahaan. Teori ini merupakan elemen bagian dari teori ekonomi politik yang mana setiap perusahaan akan menggunakan pengungkapan pertanggungjawaban yang berbasis lingkungan dan melegitimasi segala aktivitas perusahaan dengan membuat laporan keuangan sesuai dengan keinginan dari pihak *stakeholder*.

### ***Corporate Social Responsibility***

Pengungkapan pertanggungjawaban sosial (CSR) di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengharuskan bagi setiap perusahaan maupun pihak pemberi modal harus melakukan pertanggungjawaban sosial dalam usahanya. Hal tersebut dimaksudkan untuk menyelaraskan hubungan diantara pihak perusahaan dengan lingkungan maupun masyarakat sekitar. Pertanggungjawaban sosial perusahaan sendiri tentunya juga menjadi lahan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di lingkungan sekitar perusahaan (Wahyudi dan Azheri, 2008).

### **Struktur Kepemilikan Modal Asing**

Pada dasarnya menurut pendapat dari beberapa peneliti terdahulu yang meneliti tentang kepemilikan saham asing pada perusahaan ini memiliki dampak yang positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga nilai perusahaan pun juga mengalami peningkatan. Hal tersebut tentunya disebabkan karena adanya kontrol dari pihak asing yang dapat menghindari kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Kepemilikan saham dari perusahaan asing, struktur kepemilikan dalam perusahaan tersusun manajer dan juga direktur atau pihak asing, restitusi, dan juga pemilik modal. Kepemilikan modal asing sendiri merupakan jumlah persentase kepemilikan saham dari perusahaan yang dimiliki investor asing melalui pembelian saham secara langsung ke perusahaan

ataupun melalui bursa efek. Pembelian saham perusahaan yang dilakukan oleh pihak asing merupakan perwujudan dari peningkatan kinerja perusahaan dan mengalami pertumbuhan pendapatan oleh karena itu tentunya menjadi incaran bagi para calon investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan-perusahaan di Indonesia tersebut. Keadaan demikian memungkinkan harga saham perusahaan akan mengalami suatu peningkatan sehingga kinerja perusahaan juga mengalami peningkatan. Dengan adanya kepemilikan asing, maka perusahaan menjadi lebih produktif dan lebih mengutamakan capital intensive sehingga mampu menggaji karyawannya dengan tingkat upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan domestik.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengaruh Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial terhadap Kepemilikan Modal Asing**

Tanimoto dan Suzuki pada tahun 2006 melakukan penelitian yang membuktikan kepemilikan modal asing di perusahaan Jepang menjadi faktor penting dan penentu dari diterapkannya prinsip GRI. Perusahaan multinasional sebenarnya melihat keuntungan legitimasi berasal dari para stakeholdernya yang berdasarkan pasar tempat beroperasi, sehingga hal tersebut memberikan legitimasi yang begitu tinggi untuk jangka yang panjang. Menurut Haufang dan juga Jianguo dalam penelitiannya pada tahun 2007 mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki kepemilikan modal asing yang sangat tinggi tentunya akan menyebabkan terjadinya tingkat asimetri informasi yang tinggi pula, oleh karena itu biasanya perusahaan-perusahaan tersebut akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasi pertanggungjawabannya dengan sukarela.

Sedangkan menurut penelitian dari Puspitasari pada tahun 2009 menjelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang mayoritas cenderung lebih mengungkapkan laporan pertanggungjawaban sosialnya pada laporan keuangan perusahaan apabila dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki atau memiliki sedikit saham asing di perusahaan. Kemudian alasan keduanya yaitu perusahaan asing seperti perusahaan di Amerika dan juga negara-negara di Eropa lebih memiliki ilmu tentang praktik dan pengungkapan pertanggungjawabna sosial.

**H<sub>1</sub>: Pengungkapan pertanggungjawaban sosial berpengaruh terhadap kepemilikan modal asing.**

## **METODE PENELITIAN**

Populasi sendiri adalah suatu cara menggeneralisasi suatu objek maupun data yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2011). Sedangkan sampel merupakan bagian dari suatu populasi yang telah dipilih berdasarkan karakteristik penelitian yang digunakan untuk mendukung hasil yang didapat. Adapun penentuan sampel awal dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah populasi dari masing-masing sektor**

SEKTOR	JUMLAH
Industri Dasar dan Kimia	67
Aneka Industri	42
Industri Barang Konsumsi	37
<b>TOTAL</b>	<b>146</b>

### Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis analisis regresi linear sederhana untuk menganalisis hubungan variabel independen yaitu *corporate social responsibility* terhadap variabel dependen yaitu kepemilikan modal asing. Adapun model penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$KMA_{it} = \alpha + \beta_1 CSR + e$$

Keterangan :

KMA	=	Kepemilikan modal asing
$\alpha$	=	Konstanta
$\beta_1 - \beta_4$	=	Koefisien Regresi
ICD	=	<i>Corporate social responsibility</i>
e	=	<i>Error</i>

### Operasionalisasi Variabel

#### Variabel Dependen

Variabel dependen yaitu variabel yang sifatnya dapat dipengaruhi oleh variabel lain. (Sugiyono, 2011:39) yang dalam hal ini yaitu kepemilikan modal asing. Kepemilikan modal asing sendiri merupakan kepemilikan modal yang bersasal dari luar Indonesia, bisa perseroan, pemerintah, maupun perseorangan. Kepemilikan asing dalam penelitian ini dilihat pada laporan tahunan perusahaan manufaktur untuk tahun 2013-2016. Berdasarkan penelitian Makhija (2000), kepemilikan asing dirumuskan sebagai berikut:

$$KMA = \frac{\text{Saham yang dimiliki asing}}{\text{Total jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

#### Variabel Independen

Variabel independen sendiri merupakan variabel yang dapat mempengaruhi pola daripada variabel dependen yang digunakan. Variabel Independen dalam penelitian ini yaitu pengungkapan pertanggungjawaban sosial dan informasi akuntansi keuangan. Pengungkapan pertanggungjawaban sosial merupakan salah satu upaya perusahaan dalam mengkomunikasikan visi/misinya kepada

*stakeholder*. Penghitungan pengungkapan CSR menggunakan dikotomi CSR Indeks yang mengacu pada pedoman *Global Reporting Initiative* (GRI). Pengungkapan oleh GRI harus didasari dengan pedoman pengungkapan yang dikeluarkan oleh GRI yang disebut dengan *Sustainability Reporting Guidelines* (SRG). SRG yang digunakan dalam penelitian ini merupakan generasi keempat atau G4. Adapun rumus untuk mencari pengungkapan pertanggungjawaban sosial adalah sebagai berikut:

$$CSRI = \frac{\sum Xi}{n}$$

Sumber: (Haniffa & Cooke, 2005)

Keterangan:

CSRI = *Corporate Social Responsibility Index*

Xi = Jumlah item pengungkapan yang dipenuhi

N = Jumlah semua item yang mungkin dipenuhi

## HASIL PENELITIAN

Setelah dilakukan pemilihan dan seleksi sampel sesuai dengan kriteria diperoleh 141 sampel perusahaan. Proses penetapan data sampel penelitian terangkum dalam tabel berikut:

**Tabel 1: Sample Penelitian**

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016	146
2.	Jumlah perusahaan yang belum listing di BEI sejak tahun 2012	(13)
3.	Jumlah perusahaan yang ganti sektor industri sebab perubahan core bussiness, merger, atau akuisisi	(4)
4.	Jumlah perusahaan yang delisting antara tahun 2012 sampai 2016	(4)
5.	Jumlah perusahaan yang tidak memiliki saham asing	(69)
6.	Total perusahaan	71
7.	Jumlah tahun penelitian	5
8.	Total Periode Pengamatan (N)	355
9.	Jumlah data perusahaan yang terkena outlier	(251)
10.	Total Sampel (N)	104

## Statistik Deskriptif

Analisis *descriptive statistics* sering digunakan dalam penelitian yang berfungsi untuk melihat jumlah N pada penelitian, jumlah nilai minimum dan maksimum tiap-tiap variabel, serta nilai mean dan standar deviasi pada masing-masing variabel yang digunakan. Hasil analisis statistic deskriptif dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2: Deskriptif Statistics**

	N	Min	Max	Mean	StdDeviation
CSR	104	11	16	14,18	1,349
KMA	104	,31	,55	,4335	,07980
N	104				

Tabel 2 menunjukkan deskripsi variabel dependen dan independen dengan N sebanyak 104. Pengungkapan CSR (CSR) yang diprosikan dengan CSR Index dan variabel independen yaitu Kepemilikan Modal Asing diprosikan dengan KMA. Pada variabel KMA memiliki nilai minimum sebesar 0,03 pada PT Anugerah Kagum Karya tahun 2016 dan memiliki nilai maksimum sebesar 0,96 pada PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk pada tahun 2012-2016. Sedangkan pada variabel CSR memiliki nilai minimum sebesar 10 pada GRI Index nya yaitu pada PT Argha Karya Prima Industry Tbk dan PT Asahimas Flat Glass Tbk. nilai tertinggi diperoleh PT Sucaco Tbk.

### Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan langkah awal dalam melakukan uji asumsi klasik yang diharuskan untuk melakukannya. Uji normalitas sendiri berfungsi untuk mengetahui apakah model dalam penelitian telah menyetujui batas normalitas data yang harus digunakan. Untuk mengetahui hasil lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3: One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		<i>Unstandardized Residual</i>
	N	104
<i>NormalParameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>StdDeviation</i>	,07472848
<i>MostExtremeDifferences</i>	<i>Absolut</i>	,085
	<i>Positif</i>	,082
	<i>Negatif</i>	-,085
<i>Test Statistic</i>		,085
<i>Signif.</i>		,060 <sup>c</sup>

Hasil uji diatas menunjukkan nilai sebesar 0,06. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini telah lolos persyaratan normalitas yang melewati batas signifikansi 0,05.

### Uji Heterokedastisitas

Pengujian ketiga yaitu uji heterokedastisitas. Uji ini dilakukan guna mengetahui ada atau tidaknya kesamaan varasi antar periode pengamatan dimana data yang baik adalah data yang menunjukkan homokedastisitas yaitu kondisi dimana tidak adanya pola tertentu dalam grafik penelitian. Namun dalam penelitian kali ini menggunakan uji glejser untuk menguji adanya heterokedastisitas dalam penelitian. Adapun hasil lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 4 : Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser**

		Coefficients <sup>a</sup>			
		Unstandardzed Coefficients		Standardized Coefficients	
Model		B	StdError	B	t Sig.
1	(C0nstant)	,045	,040		1,126 ,263
	CSR	,001	,003	,045	,460 ,647

Hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa pengujian heterokedastiisitas memiliki nilai signifikansi sebesar 0,647 yang mana melebihi batas signifikansi yang trlah ditentukan yaitu sebsar 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengujian hetero ini telah memenuhi syarat homokedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Pada pengujian yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Pengujian ini digunakan apabila penelitian dilakukan pada rentang waktu lebih dari satu tahun, dimana apabila ingin melakukan suatu pengamatan data tidak boleh saling beketergantungan, dimana data untuk tahun berjalan tidak boleh disebabkan oleh data tahun sebelumnya. Uji autokorelasi pada penelitian kali ini yaitu memakai uji *Run Test*. Adapun hasil uji adalah sebagai berikut:

**Tabel 5 : Hasil Uji Autokolerasi**

Runs Test	
Hasil Uji	
Tingkat signifikansi	,696

Hasil diatas menunjukkan bahwa pengujian kali ini telah melewati prasarat dari gejala auto korelasi dikarenakan tingkat signifikansi yang diperoleh yaitu sebesar 0,696 berada jauh diatas tingkat signifikansi yang sudah ditentukan yaiatu 0.05.

### Hasil Koefisien Determinasi

Adapun hasil dari perhitungan R-Square model dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6: Model Summary**

Model	Nilai R <sup>2</sup>
1	0,123

a. Predictors: (Constant), CSR

Hasil R<sup>2</sup> menunjukkan angka 0,123. Yang berarti persentase yang didapatkan yaitu sebesar 12,3% dan sisanya yaitu sebesar 87,7%. Dengan demikian penelitian kali ini memiliki besaran persentase variabel independen yaitu CSR dapat memenuhi variabel dependen yaitu kepemilikan saham asing yaitu sebesar 12,3%.

### Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Adapun hasil dari pengujian parameter t yaitu sebagai berikut:

**Tabel 7: Uji T Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Signifikansi.
		B.	StdError	Coefficients		
1	(Constant)	,139	,078		1,782	,078
	CSR	,021	,005	,351	3,784	,000

a. Dependent Variable: KMA

Hasil menunjukkan bahwa variabel pertanggungjawaban sosial atau yang biasa disebut CSR memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan memiliki nilai koefisien sebesar 0,021. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel CSR memiliki pengaruh yang positif terhadap kepemilikan modal asing.

### PEMBAHASAN

Hasil uji yang ditunjukkan pada tabel uji t untuk variabel CSR terhadap kepemilikan modal asing didapatkan nilai t sebesar 0,000. Dengan demikian maka variabel pengungkapan CSR berpengaruh terhadap Kepemilikan Modal Asing (KMA) dikarenakan tingkat signifikansi yang didapatkan kurang dari 0,05. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa CSR berpengaruh terhadap Kepemilikan Modal Asing (KMA).

Seperti yang dijelaskan pada hipotesis penelitian bahwa kepemilikan modal asing merupakan saham yang dimiliki oleh baik perseorangan, perseroan, maupun pemerintah asing yang sedang melakukan bisnis di Indonesia. Menurut Tanimoto dan Suzuki dalam penelitiannya pada tahun 2005

menjelaskan bahwa kepemilikan saham dari pihak asing pada perusahaan-perusahaan di Jepang secara tidak langsung telah menjadi pendorong bagi pemerintah untuk mengadopsi GRI dalam pelaporan pertanggungjawaban sosial perusahaannya. Pertanggungjawaban sosial perusahaan sendiri merupakan salah satu wadah bagi perusahaan untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya dan juga masyarakat, sehingga dengan adanya kepemilikan saham asing akan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk lebih mendukung diberlakukannya pelaporan pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Penjelasan diatas juga diperkuat dengan teori *Stakeholder* yang menjelaskan bahwa Latar belakang pendekatan dari *stakeholders* adalah keinginan untuk membuat suatu kerangka kerja yang responsif terhadap masalah yang dihadapi oleh manajer saat itu adalah perubahan lingkungan. Teori *stakeholder* yang diungkapkan oleh Guthrie pada tahun 2004 menyatakan bahwa pihak manajemen sendiri sebenarnya dapat diharapkan akan melakukan berbagai aktivitas perusahaan yang disesuaikan dan telah diharapkan oleh pihak investor yang kemudian juga melaporkannya kepada pihak investor. Teori ini memiliki hak untuk mengetahui semua informasi dalam laporan tahunan. Baik informasi *voluntary* (pengungkapan sukarela) maupun *mandatory* (pengungkapan wajib) mengenai bagaimana kegiatan perusahaan berdampak pada *stakeholder*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder perusahaan tersebut.

Setidaknya terdapat tiga alasan bahwa pertanggungjawaban sosial memiliki pengaruh yang positif pada kepemilikan modal asing. Pertama, pertanggungjawaban sosial sendiri sebenarnya sudah diatur dalam berbagai UU yang ada di Indonesia yaitu pada pasal 74 ayat 1 UU PT yaitu tentang perusahaan terbatas yang dalam bidang bisnisnya ini berhubungan dengan lingkungan alam, sehingga diwajibkan untuk bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup disekitarnya. Selain itu juga diatur dalam UUPM Pasal 15 (b) yang menjelaskan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN juga dijelaskan lebih jauh oleh Peraturan Menteri Negara BUMN No.4 Tahun 2007 yang mengatur tentang jumlah atau nilai yang harus dikeluarkan tiap-tiap perusahaan untuk menggalang pertanggungjawaban sosial. Jadi setiap perusahaan yang beroperasi di Indonesia harus tunduk terhadap peraturan tersebut guna mewujudkan peningkatan lingkungan hidup.

Yang kedua, sebagai perusahaan multinasional, sebenarnya perlu diterapkan prinsip yang mendasar pada kesetaraan hak dalam bekerja, dan juga tidak membanding-bandingkan dari jenis suku, ras, agama, dan juga warna kulit. Sehingga peningkatan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan oleh perusahaan juga akan semakin meningkatkan kepemilikan saham baik dalam negeri maupun asing. Sebenarnya implementasi penerapan pertanggungjawaban sosial pada negara-negara lain dapat menjadi referensi contoh pada penerapan pertanggungjawaban sosial di berbagai negara seperti di Eropa dan USA yang telah mengadopsi *code of conduct*.

Yustisi dalam penelitiannya pada tahun 2014 telah menjelaskan bahwa di negara Jepang berbagai perusahaan sektor swasta telah membentuk suatu komunitas yang merencanakan agenda pembentukan pertanggungjawaba sosial atau CSR yang telah diatur dalam piagam perilaku perusahaan untuk memperoleh kepercayaan maupun hubungan baik pada masyarakat. Dengan demikian seiring berjalannya waktu akan menunmubuhkan rasa sadar bagi tiap tiap perusahaan di Jepang untuk melakukan prinsip pertanggungjawaban sosila sesuai yang telah disaepakati dalam federasi tersebut.

Sedang di negara Inggris sendiri melalui menurut Yustisi dalam penelitiannya pada tahun 2014 menjelaskan bahwa sebenarnya sanksi tentang pelaksanaan pertanggungjawaban sosial sendiri telah diatur dalam *corporate responsibility bill* tahun 2003. Dalam ketentuan tersebut berbunyi bahwa apabila seseorang atau suatu perusahaan telah melanggar pelaksanaan regulasi tersebut maka setidaknya akan dikenakan hukuman sanksi yaitu berupa penjara, ada pula yang dilarang untuk menjadi direktur pada periode selanjutnya, memberikan santunan atau ganti rugi bagi mereka yang mengalami kerugian dari dampak buruk bisnis perusahaan tersebut, dan apabila semakin parah maka bisa jadi akan diterapkan hukuman yang leih berat lagi yaitu berupa penghentian operasi perusahaan.

Yang ketiga, apabila perusahaan telah menerapkan pertanggungjawaban sosial bagi masyarakat dan lingkungan sekitar maka kepercayaan masyarakat juga akan semakin meningkat yang dapat mendorong pra investor asing untuk menanamkan modalnya pada perusahaan sehingga nilai perusahaan juga akan mengingkat seringng dengan berjalannya waktu karena dapat memberikan keuntungan bisnis pada perusahaan yang bersangkutan. Sehingga pertanggungjawaban sosial sendiri sebenarnya dapat menjadi penguat untuk mendapatkan simpatik dari masyarakat sekitar dan juga bagi pihak pemilik modal asing.

## **KESIMPULAN**

Hasil Penelitian diatasmemiliki tujuanyaknimenemukan bukti empiris mengenai hubungan daripertanggungjawaban sosial atau yang biasa disebut CSR terhadap Kepemilikan Modal Asing pada perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur yang terdaftar pada BEI untuk periode 2012 sampai dengan 2016.

Berdasar dari hasil analisis penelitian dan juga pembahasan yang telah dibuat pada Bab IV sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian dengan menggunakan regresi linier sederhana menemukan bahwa variabel CSR berpengaruh positif terhadap Kepemilikan Modal Asing.

Hal tersebut dikarenakan CSR telah diatur dalam berbagai undang-undang di Indonesia, dan di Dunia melalui *code of conduct*. Para pemilik modal asing cenderung lebih mengutamakan CSR pada perusahaan nya karena di Asia, Eropa, dan Amerika telah menerapkan CSR dengan ketat dan telah menjadi tren sehingga mereka secara sadar peduli terhadap masyarakat dengan membuat berbagai produk yang ramah terhadap lingkungan sehingga dapat memenuhi berbagai kaidah tentang hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amran, A dan S. Susela Devi. 2008. "The Impact Of Government And Foreign Affiliate Influence On Corporate Sosial Reporting (The Case Of Malaysia)". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 23 (4).
- Anoraga, Pandji. 1995. *Perusahaan Multinasional dan Kepemilikan asing*. Edisi Pertama. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Becchetti, L., R. Ciciretti., dan I. Hasan. 2007. *Corporate Social Responsibility and Shareholder's Value. CSR PAPER*. 2007–6. Atalanta.
- Badjuri, A. 2011. "Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit Auditor Independen Pada Kantor Akuntan Publik (Kap) Di Jawa Tengah". *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*. Vol. 3 (2): hal. 183–197.
- CNN Indonesia. 2016. "Riset Temukan Kualitas CSR Perusahaan Indonesia Rendah".(Online), (<http://m.cnnindonesia.com/nasional/20160721074144-20-146030/riset-temukan-kualitas-csr-perusahaan-indonesia-rendah/>). Diakses: 11 April 2019.
- Company, P., C. Jensen., dan Meckling, H. 1976. "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure". Vol. 3: pp. 305–360.
- Dowell, G., S. Hart., dan B. Yeung. 2000. "Do Corporate Global Environmental Standards Create or Destroy Market Value". *Management Science*. Vol. 46 (8): pp. 1059–1074.
- Fitria, S. 2010. "Islam dan Tanggung Jawab Sosial: Studi Perbandingan Pengungkapan Berdasarkan Global Reporting Initiative Indeks Dan Islamic Social Reporting Indeks". *Simposium Nasional Akuntansi*. Vol. XIII: hal. 1–46.
- Freeman, R. E. 2001. "A Stakeholder Approach to Strategic Management". Diakses: 11 April 2019.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guthrie, J. T., A. Wigfield., P. Barbosa., K. C. Perencevich. 2004. "Increasing Reading Comprehension and Engagement Through Concept-Oriented Reading Instruction" *International Journal*. Vol. 96(3): pp. 403–423.
- Harahap. 2011. *Analisis kritis atas laporan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Huafang, Xiao dan Y. Jianguo. 2007. "Ownership Structure, Board Composition and Corporate Voluntary Disclosure: Evidence from Listed Companies in China". *Managerial Auditing Journal*. Vol. 22 (6).
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikhsan Lubis, Arfan. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Junaedi, D. 2005. "Dampak tingkat pengungkapan informasi Perusahaan terhadap volume perdagangan dan Return saham: Penelitian empiris terhadap perusahaan-perusahaan yang Tercatat di bursa efek Jakarta." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 2(2): hal. 1-28.
- Kasali, Rhenald. 2005. *Manajemen Public Relations*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Nurlela dan Islahudin. 2008. "Pengaruh Pertanggungjawaban Sosial Terhadap Nilai Perusahaan dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating". *Simposium Nasional Akuntansi XI*.
- Pearce, John A. dan Robinson Richard B. 2014. *Manajemen Strategis formulasi implementasi dan pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan Presiden Republik Indonesia. (1999), 4(1), 2–5.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. (2007), (1), 68.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. (2007), 1-7.
- Puspitasari, A. D. 2009. "Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Laporan Tahunan Perusahaan di Indonesia." Vol 3 (2): hal. 100-130.
- R.M. Haniffa, T. E. C. 2005. "The impact of culture and governance on corporate social reporting". *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol. 5(4): pp. 391–430.
- Sembiring, E. R. 2005. "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta". Vol. 4 (4): hal. 10–16.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. (1997), (1), 1–36.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (2007), 43.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. (2007), 1–91.
- Wasilah. 2015. *Akuntansi syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Warsini, S dan N. Sixpria. 2011. "Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Praktik Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan". Vol. 10 (2): 95–105.